

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan desa wisata diantaranya dilakukan oleh Yoehansyah (2013), yang terkait dengan upaya pengembangan obyek wisata, yaitu penelitian yang menganalisis mengenai upaya pengembangan obyek wisata bunga dalam pembangunan ekonomi lokal. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya pemerintah, dampak dan faktor pendukung dan penghambat dari pengembangan obyek wisata bunga terhadap pembangunan ekonomi lokal. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, dan hasil dari penelitian ini diketahui upaya yang dilakukan pemerintah khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk mengembangkan desa tersebut dengan melakukan pembinaan dan fasilitas kegiatan serta *event* kepariwisataan yang ada di dalam daerah maupun di luar daerah. Selain itu, pedagang bunga di daerah tersebut dibantu oleh Dinas Pariwisata dengan memberikan pagar batas agar barang dagangannya tidak hilang, setelah ada kasus banyak bunga dicuri orang. Dari penelitian ini pun dapat diketahui dampak dari pengembangan obyek wisata terhadap pembangunan lokal, hal ini dapat dilihat dari pendapatan petani yang meningkat dibandingkan sebelumnya menjadi petani sayur dan merasakan kemajuan usaha karena usahanya dapat dikenal orang lain. Faktor pendorong dari penelitian ini adalah adanya dukungan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk mewujudkan menjadi desa wisata. Faktor penghambatnya adalah akses yang kurang memadai, seperti halnya kondisi jalan menuju lahan, sehingga wisatawan hanya bisa masuk sampai pasar.

Penelitian lainnya yang terkait tentang desa wisata adalah penelitian yang dilakukan oleh Badriyah (2009) dengan judul Strategi Pengembangan Kawasan Desa Wisata Adenium Dalam Menunjang Pembangunan Perekonomian Masyarakat Pedesaan. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa strategi pengembangan kawasan desa wisata dalam menunjang pembangunan perekonomian masyarakat pedesaan, selain itu untuk mendeskripsikan dan menganalisa faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi pengembangan kawasan desa wisata adenium dalam menunjang

pembangunan perekonomian masyarakat pedesaan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di kawasan desa wisata adenium, yaitu di desa Karang andong, desa Menunggal, desa Banyu urip, dan desa Kesamben. Hasil penelitian tersebut adalah strategi pengembangan produk kawasan desa wisata adenium diutamakan sebagai destinasi wisata alami dengan kemandirian lokal masyarakatnya sebagai tujuan utama pada pengembangan produknya. Sampai saat ini, program-program yang dilakukan masih bersifat jangka pendek, sedangkan program yang bersifat jangka panjang, seperti pembentukan lembaga desa wisata yang menjadi nilai mutlak dalam pengembangan wisata minat khusus masih dalam tahap awal.

Sesuai dengan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh Sari (2012), dengan judul dampak sosial ekonomi pembangunan pariwisata. Mengambil studi kasus pada pengembangan wisata makam gus dur, desa Cukir, kecamatan Diwek kabupaten Jombang. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan deskriptif untuk menganalisa data dengan menggunakan kata-kata atau kalimat yang dapat menggambarkan dampak sosial ekonomi pada tempat penelitian yang telah dituju. Hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan perubahan sosial yang dialami masyarakat terjadi apabila terdapat perbedaan pandangan masyarakat terhadap pembangunan obyek wisata. Dampak perubahan sosial yang dirasakan masyarakat pun ada yang mengarah ke arah positif dan negatif. Dampak positifnya adalah masyarakat dapat berinteraksi dengan para pengunjung yang dapat membuat pola pikir masyarakat setempat menjadi meluas, masyarakat setempat dapat menjalin tali persaudaraan antar sesama pedagang dan dapat mendorong sebagian masyarakat yang awalnya hanya sebagai pengangguran, sehingga masyarakat saat ini mempunyai pekerjaan sebagai pedagang. Dampak negatif yang dirasakan adalah perubahan pola hidup yang dahulunya bekerja sebagai petani, saat ini beralih profesi sebagai pedagang. Selain itu banyaknya pendatang dari luar daerah membuat semakin meningkat dan padatnya jumlah penduduk di desa cukir. Perubahan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat di desa cukir dapat dilihat dari semakin bertambahnya lapangan pekerjaan yang baru mulai dari pedagang, jasa sampai keamanan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Riyanti (2011), dengan judul strategi pengembangan dan dampak agrowisata belimbing terhadap peningkatan pendapatan petani plasma. Peneliti mengambil studi kasus di desa Moyoketen, kecamatan Boyolangu, kabupaten Tulungagung. Pada penelitian ini, dalam menganalisis peningkatan pendapatan masyarakat terkait dengan pengembangan agrowisata. Peneliti menggunakan analisis kualitatif, yang hasilnya berupa penjelasan dengan rangkaian kalimat yang dapat menjelaskan tentang dampak pengembangan obyek agrowisata belimbing terhadap pendapatan masyarakat. Hasilnya adalah masyarakat yang mayoritas adalah petani belimbing, dapat menjual hasil panennya ke agrowisata belimbing dengan harga yang jauh lebih tinggi yaitu Rp 4.000-4.500/kg, dibandingkan menjual hasilnya langsung ke pengepul yang hanya seharga Rp 2.500/kg. Hal ini disebabkan karena jumlah pengepul yang sedikit sehingga petani kesulitan untuk menjual hasil panennya dan harga jualnya lebih rendah dan tidak stabil. Sehingga setelah adanya agrowisata belimbing, harga jualnya meningkat dan harga stabil.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan antara lain adalah penentuan lokasi dan fokus penelitian. Penelitian ini dilakukan di desa wisata kungkuk, yang memiliki potensi yang besar dalam pengembangan pariwisata dari segi wisata alam dan buaatannya. Pada penelitian ini di fokuskan pada dampak sosial, ekonomi yang terjadi di masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

2.2 Pengertian Pendidikan

Menurut Prof. Lodge (*Philosophy of Education*) dalam Ahmadi (2016), perkataan pendidikan dipakai dalam arti luas dan sempit. Dalam pengertian luas, semua pengalaman itu adalah pendidikan. Pendidikan dalam arti luas, mengandung makna bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung dalam suatu lembaga pendidikan yang disebut sekolah. Akan tetapi, berlangsung dalam setiap ruang kehidupan manusia dan dalam seluruh sektor pembangunan. Dalam pengertian yang lebih sempit, pendidikan dibatasi pada fungsi tertentu. Di dalam masyarakat yang terdiri atas penyerahan adat-istiadat (tradisi) dengan latar belakang sosialnya, pandangan

hidup masyarakat kepada generasi berikutnya, dan demikian seterusnya. Pendidikan ini identik dengan sekolah. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang direkayasa secara terprogram dan sistematis dengan segala aturan yang sangat kaku.

Pengertian pendidikan menurut Brubacher dalam Ahmadi (2016), pendidikan merupakan suatu proses timbal balik dari tiap pribadi manusia dalam penyesuaian dirinya dengan alam, teman, dan alam semesta. Pendidikan merupakan pula perkembangan yang terorganisasi dan kelengkapan dari semua potensi manusia, moral, intelektual, jasmani (panca indra), dan untuk kepribadian individu dan kegunaan masyarakatnya yang diarahkan demi menghimpun semua aktivitas tersebut untuk tujuan hidupnya.

Menurut Dahama & Bhatnagar dalam Ahmadi (2016), pendidikan merupakan proses membawa perubahan yang diinginkan dalam perilaku manusia. Pendidikan dapat juga didefinisikan sebagai proses perolehan pengetahuan dan kebiasaan-kebiasaan melalui pembelajaran atau *studi*. Jika pendidikan menjadi efektif hendaknya menghasilkan perubahan-perubahan dalam seluruh komponen perilaku (pengetahuan dan gagasan; norma dan keterampilan; nilai dan sikap; serta pemahaman dan perwujudan).

Menurut Ahmadi (2016), pendidikan juga memiliki berbagai macam, hal ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendidikan Formal

Pada dasarnya, pendidikan formal adalah pendidikan yang memiliki aturan resmi yang sangat ketat dalam segala aspeknya, jauh lebih ketat dari pendidikan informal dan nonformal. Pendidikan formal mencakup sekolah dan perguruan tinggi. Dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari atas pendidikan dasar (SD/MI), pendidikan menengah (SMP/M.Ts,SMA/SMK/MA), dan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi mencakup sekolah tinggi, akademi dan universitas.

Pendidikan formal menurut Combs dalam Ahmadi (2016): pendidikan formal terstruktur secara hierarkis, sistem pendidikan yang bergelar secara kronologis yang berlangsung mulai sekolah dasar hingga universitas dan termasuk, studi-studi

akademik umum, ragam program-program dan lembaga-lembaga khusus pelatihan teknik dan profesional penuh waktu.

Menurut O.P. Dahama dan O.P Bhatnagar dalam Ahmadi (2016): pendidikan formal pada dasarnya merupakan suatu aktivitas institusional, seragam, dan berorientasi pada mata pelajaran, waktu belajarnya penuh, terstruktur secara hierarkis, mengarah pada perolehan ijazah, gelar dan diploma.

2. Pendidikan Informal

Pendidikan informal adalah pendidikan yang tidak terstruktur yang berkenaan dengan pengalaman sehari-hari yang tidak terencana dan tidak terorganisasi. Menurut Kleis dalam Ahmadi (2016), jika pengalaman-pengalaman diinterpretasikan atau dijelaskan oleh orang-orang yang lebih tua atau teman sejawat pengalaman itu merupakan pendidikan informal.

Menurut UU RI Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Pendidikan yang dilaksanakan dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat yang terjadi secara alamiah disebut sebagai pendidikan informal.

3. Pendidikan Nonformal

Menurut Kleis dalam Ahmadi (2016), pendidikan nonformal adalah usaha pendidikan yang melembaga dan sistematis, di mana isi diadaptasikan pada kebutuhan-kebutuhan peserta didik yang spesifik untuk memaksimalkan belajar dan meminimalkan unsur-unsur lain yang sering dilakukan oleh para guru di sekolah formal.

Menurut UU RI Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan pendidikan nonformal menurut UNESCO dalam Ahmadi (2016), mendefinisikan bahwa pendidikan nonformal adalah setiap kegiatan pendidikan yang diorganisasi dan berkelanjutan yang tidak berkaitan secara tepat pada definisi pendidikan formal. Pendidikan non formal dapat terjadi, baik di dalam maupun di luar lembaga-lembaga pendidikan dan melayani orang-orang semua usia.

2.3 Pengertian Struktur Sosial

Struktur sosial merupakan penciptaan pola relasi-relasi sosial atau fenomena-fenomena sosial. Konsep seperti itu sama halnya dengan kerangka atau seperti tiang penyangga sebuah bangunan. Struktur sebagai merujuk pada aturan-aturan dan sarana-sarana. Akan tetapi, dalam analisis sosial, struktur merujuk pada kelengkapan-kelengkapan penstrukturan yang memungkinkan 'pengikatan' waktu-ruang dalam sistem-sistem sosial. Kelengkapan-kelengkapan itu memungkinkan keberadaan praktik-praktik sosial serupa dalam rentang waktu dan ruang yang sangat beragam sekaligus memberikan praktik-praktik sosial itu suatu bentuk 'sistemik' (Giddens, 2010).

Menurut Stangor dalam Meinarno (2011), struktur sosial merupakan aturan yang membentuk norma, peran, dan status di dalam sebuah kelompok sosial. Sedangkan, menurut Meinarno (2011), struktur sosial bermakna bahwa sebuah kelompok sosial atau masyarakat yang tentunya terdiri atas banyak individu, membutuhkan dan akhirnya membentuk aturan bagi diri mereka sendiri supaya setiap anggotanya dapat bertingkah laku dan berinteraksi secara proporsional.

2.4 Pengertian Status

Menurut Stangor dalam Meinarno (2011), status didefinisikan sebagai tingkat, jumlah otoritas, *prestise*, dan reputasi yang dimiliki anggota tertentu di dalam masyarakat. Status tertentu, misalnya presiden, akan melahirkan peran-peran yang tertentu pula yang khas dengan status presiden yang disandang seseorang. Presiden berhak untuk membentuk kabinet, memimpin rapat kabinet, dan membuat RAPBN. Tentu saja di suatu negara, presiden tergolong memiliki status tinggi yang memiliki *prestise* yang tinggi pula, sehingga status presiden menjadi rebutan para elit politik (Meinarno, 2011).

2.5 Pengertian Peran

Menurut Stangor dalam Meinarno (2011), peran dapat didefinisikan sebagai norma kelompok yang mengatur tingkah laku yang diharapkan dari seorang anggota kelompok. Peran juga dapat dikatakan sebagai pembeda antara anggota yang satu

dengan yang lain di dalam kelompok yang sama. Setiap kelompok masyarakat tentunya memiliki beraneka anggota. Setiap anggota diharapkan bertingkah laku tertentu yang belum tentu sama dengan anggota kelompok lain. Misalnya, di dalam keluarga, ayah, ibu, dan anak masing-masing diharapkan menampilkan tingkah laku yang berbeda. Ayah diharapkan mencari nafkah, ibu melahirkan anak dan mengurus rumah, dan anak berbakti kepada kedua orangtua (Meinarno, 2011).

2.6 Perubahan Sosial

Menurut Jacobus Ranjabar (2015) perubahan sosial adalah proses di mana terjadi perubahan struktur masyarakat yang selalu berjalan sejajar dengan perubahan kebudayaan dan fungsi suatu sistem sosial. Hal ini dinamakan “perubahan sosial hubungan fungsional”

2.6.1 Ciri-ciri Perubahan Sosial

a. Differential Social Organization

Hubungan antar individu dengan individu, individu dengan masyarakat tetap terjalin tindakan-tindakan individu umumnya seragam. Jika ada penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan norma, dengan cepat mendapat teguran dari masyarakat sekelilingnya. Sebagaimana besar anggota masyarakat tidak lagi mengetahui norma mana yang berlaku dan tingkah laku mana yang benar, dan kondisi tersebut merupakan tanda-tanda perubahan sosial.

b. Kemajuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Mendorong Perubahan Pemikiran Ideologi, Politik dan Ekonomi

Kemajuan ekonomi menimbulkan sikap individualisme, sikap ini mengakibatkan ideologi individualisme menyusup ke dalam bidang ekonomi, agar inisiatif perseorangan dalam kegiatan ekonomi diberi kelonggaran. Selain itu, ideologi ini menginginkan agar pengawasan pemerintah di bidang ekonomi di hapuskan. Sehingga tercipta kebebasan, perubahan norma dari yang lama ke yang baru. Perubahan sosial ini menunjukkan adanya pergeseran norma, perubahan, keseragaman penafsiran. Pergeseran norma ini menimbulkan kejahatan, karena norma yang terdahulu tidak diikuti. Pada bidang politik timbul revolusi demokrasi yang menuntut derajat sama harkat, memiliki kebebasan berpendapat. Hal ini

mengakibatkan ideologi individualism dalam politik memberontak terhadap ikatan tradisional yang mengekang kebebasan diri dan hal-hal itu merupakan tanda adanya perubahan sosial.

c. *Mobilitas*

Mobilitas terjadi karena adanya revolusi industri dan demokrasi, mobilitas dapat bergerak vertikal maupun horizontal. Revolusi industri dapat mengakibatkan seseorang untuk melakukan mobilitas horizontal, seperti orang-orang di desa berpindah ke kota. Sedangkan, jika dilihat dari revolusi demokrasi dapat membuat seseorang melakukan mobilitas vertikal, seseorang dapat berubah status, misalnya; seorang petani menjadi anggota DPR, seorang pengusaha menjadi seorang bupati, Gubernur, wakil presiden, serta presiden. Dari mobilitas yang terjadi dapat merenggangkan hubungan keluarga dan lingkungan. Keluarga sudah tidak berfungsi dan berjalan semestinya, karena kesibukan mengejar kemewahan dan perubahan status. Demikian juga lingkungan tidak lagi efektif mengadakan pengawasan terhadap individu tersebut, individu yang bersangkutan akan menjadi *marginal man* yang secara psikis dan efektif sangat stabil. Keadaan ini memudahkan untuk berbuat kejahatan.

d. *Culture Conflict*

Setiap kebudayaan memiliki norma-norma yang berbeda satu sama lainnya. Tingkah laku individu pun dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat dimana individu itu hidup. Karena setiap organisasi sosial memiliki norma-norma tertentu yang kemungkinan saling bertentangan, maka individu dari organisasi lain akan merasa asing dengan norma yang berlaku. Hal ini yang dinamakan *culture conflict* yang dapat mengakibatkan *mental conflict* dan *mental conflict* dapat menimbulkan kejahatan.

e. Perubahan yang Direncanakan dan Perubahan yang Tidak Direncanakan

Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang menghendaki perubahan, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sedangkan perubahan yang tidak

direncanakan adalah perubahan-perubahan yang berlangsung di luar jangkauan masyarakat dan mengakibatkan perubahan sosial yang tidak diharapkan masyarakat.

f. Kontroversi (pertentangan)

Menurut Pasaribu (1982) dalam Ranjabar (2015), perubahan sosio-kultural mengakibatkan kontroversi, yang dapat diklasifikasikan dan dijelaskan sebagai berikut :

- Pertama, golongan-golongan yang telah mewarisi hak-hak istimewa dalam kondisi yang sedang berlaku, akan kontroversi terhadap perubahan tradisional. Karena takut kehilangan hak istimewa.
- Kedua, perubahan menghancurkan kebiasaan. Manusia hidup atas dasar kebiasaan dan kebiasaan itu akan hancur bila terjadi perubahan. Inilah sebabnya ancaman terhadap perubahan, unsur kultural ini dianggap sebagai ancaman terhadap kepribadian.
- Ketiga, perubahan membawa pola-pola baru tingkah laku. Dengan adanya pola-pola baru yang ada di masyarakat maka secara lambat pola-pola lama akan menghilang. Masa periode transisi itu menimbulkan ketegangan-ketegangan, problem sosial dan *neurose*.

2.7 Faktor-Faktor Pendorong Perubahan Sosial

Perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat di dasarkan adanya faktor pendorong yang mempengaruhi perubahan sosial. faktor-faktor pendorong perubahan sosial diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Toleransi

Toleransi merupakan sikap menerima sesuatu keadaan. Toleransi terhadap perbuatan menyimpang merupakan sarana dalam mengadakan perubahan sosial. Dengan adanya toleransi akan mendorong individu yang kreatif menciptakan usaha-usaha perubahan. Masyarakat yang memiliki toleransi, memiliki kontrol sosial yang lemah. Penyimpangan terjadi bila ada ketidaksesuaian antara aspirasi dengan saluran yang berfungsi menciptakan cita-cita tadi.

b. Sistem terbuka lapisan masyarakat

Pada sistem terbuka memungkinkan adanya gerakan sosial vertikal yang luas, atau berarti memberi kesempatan kepada individu untuk maju atas dasar kemampuan sendiri. Sistem terbuka yang ketat menyulitkan gerak sosial vertikal. Individu yang merasa puas dalam kedudukannya diberi kesempatan memperbaiki nasib. Oleh karena itu, individu yang memiliki kreatifitas, kritis, berkesempatan memperbaiki kedudukan. Pada golongan masyarakat yang berkedudukan lebih rendah, sering kali terdapat perasaan tidak puas terhadap kedudukan sosial mereka sendiri, sehingga mendorong seseorang untuk berusaha menaikkan kedudukannya.

c. Heterogenitas

Tiap kelompok penduduk memiliki aspirasi serta saluran mencapai aspirasi. Masyarakat yang bersifat heterogenitas memiliki aspirasi atau saluran aspirasi yang satu sama lain berbeda. Perbedaan aspirasi ini memungkinkan bentrokan sosial baik secara fisik maupun non fisik. Bentrokan-bentrokan sosial ini pada gilirannya menemukan penyelesaian, keharmonisan, dengan melahirkan kesamaan aspirasi. Kesamaan aspirasi merupakan pertanda bahwa telah ada perubahan sosial budaya. Jadi, masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang mempunyai latar belakang kebudayaan yang berbeda, ras yang berbeda, ideologi yang berbeda dan seterusnya, mempermudah terjadinya pertentangan-pertentangan yang mengandung kegoncangan-kegoncangan. Keadaan yang demikian menjadi pendorong bagi terjadinya perubahan-perubahan dalam masyarakat.

d. Rasa tidak puas

Ketidakpuasan masyarakat yang telah berakar, menyebabkan timbulnya revolusi dalam masyarakat. Revolusi melahirkan perubahan dalam seluruh aspek kehidupan. Ketidakpuasan dalam masyarakat ditimbulkan kebijaksanaan penguasa yang tidak berakar dalam aspirasi masyarakat, akan lebih mendorong terjadinya perubahan-perubahan dalam masyarakat.

e. Karakter masyarakat

Secara etnopsikologis tiap kelompok masyarakat berbeda karakter sehingga berbeda pula sikap menanggapi sesuatu masalah sosial. Ada masyarakat yang bersikap mudah menerima sesuatu hal yang baru, sikap ini berkaitan dengan nilai yang dianut dalam masyarakat. Selain itu, sikap masyarakat yang menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju yang telah melembaga dalam masyarakat, maka akan mendorong masyarakat untuk usaha-usaha penemuan baru. Hadiah Nobel misalnya, merupakan pendorong untuk menciptakan hasil-hasil karya yang baru.

f. Pendidikan

Perubahan adalah masalah sejauh mana sikap menerima dan mengubah sikap merupakan masalah pendidikan, mengubah sikap dilakukan melalui pendidikan. Ini berarti, pendidikan memberi dorongan mengubah masyarakat. Pendidikan mengajarkan kepada individu aneka macam kemampuan, memberikan nilai-nilai tertentu bagi manusia, terutama dalam membuka pikirannya serta menerima hal-hal baru dan juga bagaimana cara berpikir secara ilmiah.

g. Ideologi

Ideologi adalah sistem nilai yang diarah-dagingkan sesuatu anggota masyarakat untuk mengatur tingkah laku bermasyarakat. Sistem nilai ini memberi petunjuk bertingkah laku dalam berbagai segi kehidupan duniawi. Ideologi merupakan suatu hasil konsensus bersama dari berbagai kelompok tentang realitas yang hidup dalam masyarakat. ini berarti memberikan gambaran sejauh mana sesuatu masyarakat untuk memahami dirinya sendiri.

2.8 Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons

Suatu *fungsi* adalah “ Suatu kompleks kegiatan-kegiatan yang diarahkan kepada pemenuhan suatu kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan sistem itu” (Rocher, 1975:40;R. Stryker, 2007). Menurut Parsons dalam Ritzer (2015), menggunakan definisi tersebut, Parsons percaya bahwa ada empat imperatif fungsional yang perlu bagi semua sistem. Keempat imperatif fungsional itu dikenal sebagai skema AGIL sebagai berikut:

1. Adaptasi

Suatu sistem harus mengatasi kebutuhan mendesak yang bersifat situasional eksternal. Sistem itu harus beradaptasi dengan lingkungannya dan mengadaptasikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya.

2. Pencapaian tujuan

Suatu sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.

3. Integrasi

Suatu sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian dari komponennya. Ia juga harus mengelola hubungan di antara tiga imperatif fungsional lainnya.

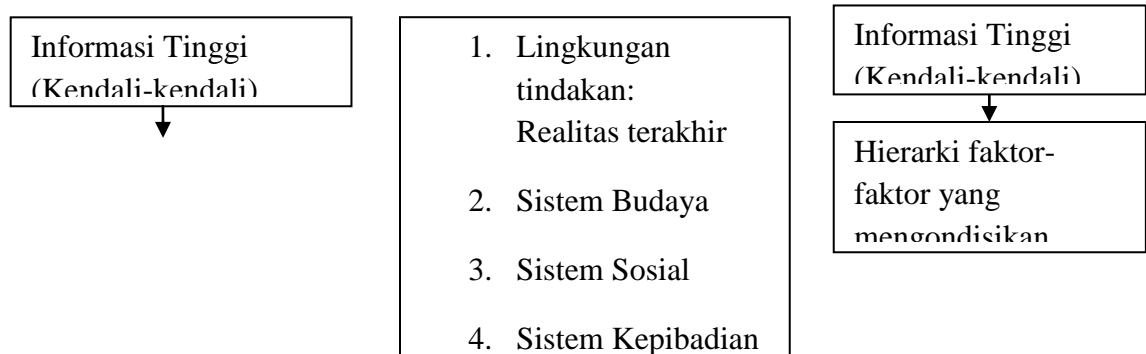
4. Latensi (Pemeliharaan pola)

Suatu sistem harus menyediakan, memelihara dan memperbarui baik motivasi para individu maupun pola-pola budaya yang menciptakan dan menopang motivasi itu.

Dalam menjalankan fungsi yang dinamakan dengan AGIL tersebut, terdapat sistem-sistem yang mendasari fungsi struktural berjalan dengan baik. Sistem-sistem tersebut dijelaskan sebagai berikut:

2.8.1 Sistem Tindakan

Parsons mempunyai gagasan yang jelas mengenai “level-level” analisis sosial dan juga antar hubungan mereka. Susunan hierarkinya jelas, dan didalam sistem parsons level-level itu disatukan dalam dua cara. *Pertama*, setiap level yang lebih rendah memberikan kondisi-kondisi, energi yang diperlukan bagi level-level yang lebih tinggi. *Kedua*, level-level yang lebih tinggi mengendalikan level-level dibawahnya di dalam hierarki itu. Hal tersebut dapat dilihat pada skema tindakan parsons sebagai berikut:





Gambar 1. Skema Tindakan Parsons

Sumber: Ritzer, 2012.

2.8.2 Sistem Sosial

Konsep Parsons mengenai sistem sosial dimulai pada level mikro di dalam interaksi antara ego dan alterego, didefinisikan sebagai bentuk sistem sosial yang paling parlementer. Parsons mendefinisikan suatu sistem sosial sebagai berikut:

Suatu sistem sosial didasarkan pada suatu pluralitas para aktor individual yang berinteraksi satu sama lain di dalam suatu situasi yang setidaknya mempunyai aspek fisik atau lingkungan, para aktor yang termotivasi dalam kaitannya dengan tendensi ke arah “optimisasi kepuasan” dan relasi mereka dengan situasi-situasinya saling meliputi, didefinisikan dan dimediasi dalam kerangka suatu sistem simbol-simbol yang terstruktur dan dianut bersama secara budaya”

Definisi tersebut berusaha menggambarkan suatu sistem sosial dalam kaitannya dengan banyak konsep kunci seperti para aktor, interaksi, lingkungan, optimisasi kepuasan, dan kebudayaan. Meskipun berkomitmen untuk melihat sistem sosial sebagai suatu sistem interaksi, Parsons tidak menganggap interaksi sebagai unit fundamental di dalam studinya mengenai sistem sosial. Lebih tepatnya, parsons menggunakan kompleks peran-status sebagai unit dasar sistem itu. Kompleks tersebut bukan suatu aspek para aktor juga bukan aspek interaksi, tetapi lebih tepatnya merupakan suatu komponen struktural sistem sosial. Status mengacu kepada suatu posisi struktural di dalam sistem sosial, dan peran adalah apa yang dilakukan sag aktor di dalam posisi demikian, yang dilihat di dalam konteks signifikansi fungsionalnya untuk sistem yang lebih besar.

2.8.2.1 Para aktor dan sistem sosial

Dalam suatu proses sosialisasi yang berhasil, norma-norma dan nilai-nilai itu diinternalisasi; yakni norma-norma dan nilai-nilai itu menjadi bagian dari “suara hati” para aktor. Akibatnya, di dalam mengejar kepentingan-kepentingannya sendiri, para aktor sebenarnya melayani kepentingan-kepentingan sistem sebagai suatu keseluruhan. Seperti pernyataan yang diberikan oleh Parsons bahwa kombinasi pola-pola orientasi nilai yang diperoleh (oleh sang aktor di dalam sosialisasi) dalam derajat yang sangat penting pastilah merupakan suatu fungsi struktur peran yang fundamental dan nilai-nilai sistem sosial yang dominan.

2.8.2.2 Masyarakat

Meskipun ide akan suatu sistem sosial meliputi semua tipe kolektivitas, suatu sistem sosial yang spesifik dan penting secara khusus ialah masyarakat. Parsons membedakan empat struktur, atau subsistem yang ada di dalam masyarakat dari segi fungsi-fungsi (AGIL). *Ekonomi* adalah subsistem yang berfungsi menyesuaikan masyarakat kepada lingkungan melalui kerja, produksi dan alokasi. Melalui fungsi itu, ekonomi menyesuaikan lingkungan kepada kebutuhan-kebutuhan masyarakat, dan ia membantu masyarakat beradaptasi kepada realitas-realitas eksternal. *Polity* melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan mengejar tujuan-tujuan masyarakat dan memobilisasi para aktor dan sumber-sumber daya menuju tujuan itu. *Sistem kepercayaan* sebagai contoh di sekolah-sekolah atau keluarga, menangani fungsi latensi dengan menularkan kebudayaan seperti norma dan nilai-nilai kepada para aktor dan memungkinkan mereka menginternalisasikan. *Integrasi* dilaksanakan oleh komunitas masyarakat seperti hukum yang mengkoordinasi berbagai komponen masyarakat.

2.8.3 Sistem Budaya

Menurut Parsons, kebudayaan sebagai kekuatan utama yang mengikat berbagai unsur dunia sosial, atau dalam peristilahannya, sistem tindakan. Budaya menengahi interaksi di kalangan para aktor dan mengintegrasikan

kepribadian dan sistem-sistem sosial. oleh karena itu, didalam sistem sosial kebudayaan terwujud dalam norma-norma dan nilai-nilai. Kebudayaan dilihat sebagai sistem simbol-simbol yang terpola, teratur yang merupakan sasaran orientasi bagi para aktor, aspek-aspek sistem kepribadian yang diinternalisasikan, dan pola-pola yang terlembagakan didalam sistem sosial. oleh karena itu, sebagian besar bersifat simbolik dan subjektif, kebudayaan siap ditularkan dari satu sistem ke sistem lain.

2.8.4 Sistem Kepribadian

Sistem kepribadian dikendalikan bukan hanya oleh sistem budaya tetapi juga oleh sistem sosial. Kepribadian didefinisikan sebagai sistem orientasi dan motivasi tindakan aktor individual yang terorganisasi. Komponen dasar kepribadian adalah watak. Watak-watak yang dibutuhkan adalah dorongn-dorongan yang dibentul oleh latar sosial. watak memaksa para aktor untuk menerima atau menolak objek-objek yang tersedia tidak memuaskan watak-watak yang dibutuhkan secara memadai

2.8.5 Organisme Behavioral

Organisme behavioral termasuk sebagai salah satu dari empat sistem tindakan. Menurut Parsons organisme behavioral dimasukkan dalam empat sistem tindakan karena merupakan sumber energi untuk bagian lain sistem itu. Meskipun ia didasarkan pada susunan genetik, pengaturannya dipengaruhi oleh proses pengondisian dan pembelajaran yang terjadi selama kehidupan individu.

2.9 Teori Evolusioner

Menurut Parsons dalam Ritzer (2012), orientasi umum Parsons kepada studi perubahan sosial dibentuk oleh biologi. Untuk membahas proses tersebut, Parsons mengembangkan apa yang dia sebut “suatu paradigma perubahan evolusioner”. Komponen pertama dalam paradigma tersebut adalah *diferensiasi*. Setiap masyarakat terdiri dari serangkaian subsistem yang berbeda baik didalam hal struktur maupun signifikansi fungsionalnya bagi

masyarakat yang lebih besar. Ketika masyarakat berkembang perlahan-lahan, subsistem-subsistem baru dideferensiasi.

Parsons juga berargumen bahwa proses diferensiasi menyebabkan sekumpulan baru masalah *integrasi* untuk masyarakat. sewaktu subsistem-subsistem berkembang biak, masyarakat menghadapi masalah-masalah baru dalam mengoordinasikan pelaksanaan unit-unit tersebut. Suatu masyarakat yang sedang menjalani evolusi harus bergeser dari suatu sistem status sosial berdasarkan kelahiran menuju status sosial berdasarkan prestasi. Diperlukan sederet keahlian dan kemampuan yang lebih luas untuk menangani subsistem-subsistem yang lebih menyebar. Kemampuan-kemampuan yang digeneralisasi harus dibebaskan dari ikatan-ikatan yang didasarkan pada kelahiran agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal itu berarti bahwa kelompok-kelompok yang dulu tidak diperbolehkan menyumbang kepada sistem, harus dibolehkan masuk sebagai anggota penuh masyarakat tersebut.

2.10 Pengertian Interaksi Sosial

Menurut Meirarno (2011), interaksi sosial merupakan hal yang dilakukan oleh manusia dalam keidupan sehari-hari sejak dulu hingga sekarang. Dalam interaksi sosial manusia melakukan pertukaran simbol, menginterpretasikan simbol, dan bertingkah laku tertentu atas dasar pertukaran simbol tersebut. Tingkah laku yang muncul merupakan hasil interaksi sosial, artinya dipengaruhi oleh adanya interaksi tersebut.

Menurut Macionis dalam Meirarno (2011), interaksi sosial didefinisikan sebagai proses yang didalamnya terdapat aksi dan reaksi antarmanusia sebagai bentuk relasi sesama manusia. Interaksi sosial terjadi setiap hari, antar individu dan antar kelompok, secara tatap muka maupun melalui media perantara, serta pada berbagai situasi.

2.11 Pengertian Tentang Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi sosial dan ekonomi merupakan sebuah istilah yang sering di pakai untuk mengetahui kedudukan seseorang/keluarga di dalam masyarakat. Kondisi sosial dan ekonomi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan

kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan lainnya yang dapat menunjukkan kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Menurut Laing (2016), kondisi sosial dan ekonomi merupakan kedudukan atau posisi seseorang didalam suatu kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, jenis tempat tinggal, pendapatan, tingkat pendidikan dan jabatan dalam organisasi. Kedudukan seseorang dalam suatu posisi disertai pula seperangkat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh si pembawa status.

2.12 Pariwisata

Menurut Suwanto (2004) pariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya. Istilah pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, yaitu sebagai perubahan tempat tinggal sementara seseorang karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah. Sehingga dapat dikatakan perjalanan wisata seseorang memiliki tujuan untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu. Selain itu juga dapat bertujuan untuk olahraga untuk kesehatan, konvensi, keagamaan dan keperluan usaha lainnya.

Menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 dalam Hadiwijoyo (2012) pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Menurut Arjana (2016) pariwisata berasal dari bahasa sansekerta, pari adalah sempurna, lengkap, tertinggi. Sedangkan, wisata adalah perjalanan, sehingga pariwisata adalah perjalanan yang lengkap/sempurna.

2.13 Pariwisata dalam Perekonomian

Menurut Prasiasa (2013), manusia mempunyai keberanekaragaman kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Kebutuhan hidup primer, yaitu makanan. Kebutuhan sekunder, yaitu pakaian. Serta kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan akan tempat tinggal. Semakin berkembangnya peradaban manusia tidak hanya membutuhkan kebutuhan primer dan sekunder, tetapi juga kebutuhan untuk bersantai dan berlibur menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat modern.

Negara yang mengembangkan sektor pariwisata sebagai industri, dengan adanya lalu lintas orang-orang (wisatawan), dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian di negara tersebut. Sektor pariwisata telah diandalkan sebagai salah satu sektor andalan dalam perolehan devisa di beberapa negara, melebihi ekspor bahan-bahan mentah maupun hasil tambang.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara mengakibatkan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, munculnya ekonomi kelas menengah memicu tumbuhnya pariwisata. Sebagai contoh, kalangan orang berduit atau kelas menengah di Indonesia, pergi berkunjung keluar negeri terutama ke negara jiran, Singapura, Malaysia dan Bangkok untuk berwisata, terutama wisata belanja. Jadi wisatawan pergi ke suatu destinasi wisata untuk mencari atau mendapatkan kesenangan (Arjana, 2016).

2.14 Pariwisata Berbasis Masyarakat

Menurut Bank Dunia dalam Prasiasa (2013), pariwisata berbasis masyarakat dicetuskan pada bulan juli tahun 2000, ketika bank dunia mulai memikirkan cara menanggulangi kemiskinan melalui sektor pariwisata. Konsep pariwisata berbasis masyarakat itu meliputi tiga aktivitas pariwisata, yaitu *adventure travel*, *cultural travel*, dan *ecotourism*. Dari ketiga aktivitas pariwisata diatas, bank dunia meyakini bahwa hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan sekitarnya, sekaligus memelihara budaya, kesenian, dan cara hidup masyarakat.

Pariwisata sebagai andalan perekonomian dalam operasionalnya bertumpu pada kebudayaan serta partisipasi masyarakat di destinasi pariwisata. Hal ini berarti permintaan terhadap produk wisata oleh wisatawan terkait dengan kebudayaan dan partisipasi masyarakat di destinasi pariwisata. (Prasiasa, 2013)

Keberhasilan pariwisata berbasis masyarakat akan mampu menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan berdampak positif bagi pelestarian lingkungan dan budaya asli setempat. Yang nantinya akan tumbuh jati diri dan rasa bangga dari masyarakat akan kekayaan daerahnya, sehingga akan mengakibatkan peningkatan kegiatan pariwisata.

Konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat untuk pertama kalinya di populerkan oleh Murphy yang dikutip dalam Isnaini (2007), menurut Murphy produk pariwisata secara lokal diartikulasikan dan dikonsumsi, produk wisata dan konsumennya harus *visible* bagi penduduk lokal yang seringkali sangat sadar terhadap dampak turisme. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pariwisata harus melibatkan masyarakat lokal, sebagai bagian dari produk turisme, selain itu, dari pihak industri juga harus melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan.

Menurut Hadiwijoyo (2012), pariwisata berbasis masyarakat adalah pariwisata yang menyadari kelangsungan budaya, sosial, dan lingkungan. Bentuk pariwisata ini dikelola dan dimiliki oleh masyarakat untuk masyarakat, guna membantu para wisatawan untuk meningkatkan kesadaran mereka dan belajar tentang masyarakat dan tata cara hidup masyarakat lokal (*local way of life*). Pariwisata berbasis masyarakat bukanlah bisnis wisata yang bertujuan untuk memaksimalkan profit atau keuntungan bagi para investor. Pariwisata berbasis masyarakat lebih terkait dengan dampak pariwisata bagi masyarakat setempat dan sumberdaya lingkungan.

Menurut Pinel yang dikutip oleh Isnaini dalam Hadiwijoyo (2012), pariwisata berbasis masyarakat adalah model pengembangan pariwisata yang berasumsi bahwa pariwisata harus berangkat dari kesadaran nilai-nilai kebutuhan masyarakat sebagai upaya membangun pariwisata yang lebih bermanfaat bagi kebutuhan, inisiatif dan peluang masyarakat lokal. Pariwisata berbasis masyarakat lahir dari strategi pengembangan masyarakat dengan menggunakan pariwisata sebagai alat untuk memperkuat kemampuan organisasi masyarakat rural/lokal.

2.15 Perbedaan Pembangunan Pariwisata Konvensional dengan Pariwisata Berbasis Masyarakat

Menurut Natori dalam Prasiasa (2013), pada pembangunan pariwisata konvensional, kebijakan dalam bidang pembangunan pariwisata adalah dengan sistem *top-down*, atau dapat dikatakan menggunakan pendekatan sentralis, sedangkan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat menggunakan sistem *bottom-up*. Pada model pembangunan pariwisata konvensional, interaksi antara sumber daya, penduduk, dan pengunjung tidak seimbang sehingga menimbulkan konflik. Namun,

pada model pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, sumber daya, penduduk lokal, dan pengunjung berinteraksi secara harmonis, selain menjadikan masyarakat sebagai faktor utama dalam pembangunan pariwisata. Berikut adalah perbedaan konsep pembangunan pariwisata konvensional dan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat :

Gambar 2. Perbeda

Gambar 2. Perbedaan Konsep pembangunan pariwisata konvensional dengan pariwisata berbasis masyarakat.

Sumber: Prasiasa,2013.

Menurut Pitana dalam Prasiasa (2013), pada pembangunan pariwisata berbasis masyarakat akan terjadi proses pembelajaran sosial (*social learning*), sehingga masyarakat turut serta dalam berbagai tahap pembangunan. Dengan demikian, pengelolaan pembangunan benar-benar dilakukan oleh mereka yang hidup dan kehidupannya dipengaruhi oleh pembangunan itu sendiri.

2.16 Tinjauan Mengenai Desa Wisata

2.16.1 Pariwisata perdesaan

Pariwisata perdesaan dapat di definisikan berdasarkan pada ketersediaan fasilitas, kegiatan yang dilakukan ataupun berdasarkan pada budaya dan tradisi yang ada di desa tersebut. Menurut Nuryanti (1992) dalam Hadiwijoyo (2012) pariwisata perdesaan adalah bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung

dan disajikan sesuai dengan struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tradisi yang berlaku.

2.16.2 Pengertian Desa Wisata

Menurut Pariwisata Inti Rakyat (PIR) dalam Hadiwijoyo (2012), yang dimaksud desa wisata adalah suatu kawasan perdesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian perdesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya : atraksi, akomodasi, makanan-minuman, dan kebutuhan wisata lainnya.

2.16.3 Syarat Desa Wisata

Suatu desa bisa dikatakan sebagai desa wisata jika desa tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi.
2. Memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan local, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata.
3. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata, serta para wisatawan yang datang ke desanya.
4. Keamanan di desa tersebut terjamin.
5. Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai.
6. Beriklim sejuk atau dingin
7. Berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

2.17 Pendekatan dalam Pengembangan Desa Wisata

Menurut D'amore dalam Isnaini (2007), model pendekatan bagi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, yakni:

1. Mengidentifikasi prioritas pembangunan yang dilakukan penduduk lokal.
2. Mempromosikan dan mendorong penduduk lokal.

3. Pelibatan penduduk lokal dalam industri.
4. Investasi modal lokal atau wirausaha sangat dibutuhkan.
5. Partisipasi penduduk dalam *event-event* dan kegiatan yang luas.
6. Produk wisata untuk menggambarkan identitas lokal.
7. Mengatasi problem-problem yang muncul sebelum pengembangan yang lebih jauh.

Pengembangan desa wisata perlu di rencanakan secara matang agar dampak yang timbul dapat terkontrol. Dalam perencanaan pengembangan desa wisata terdapat 2 pendekatan yang dapat dilakukan, berdasarkan penelitian dan studi yang telah dilakukan oleh *United Nation Development Program (UNDP)* dalam Hadiwijoyo 2012, yaitu:

2.17.1 Pendekatan Pasar Pengembangan Desa Wisata

1. Interaksi langsung: wisatawan diberikan fasilitas untuk merasakan tinggal atau bermalam dalam akomodasi yang dimiliki oleh desa tersebut. Hal tersebut didasari dan disesuaikan dengan daya dukung dan potensi masyarakat setempat.
2. Interaksi setengah langsung: wisatawan di berikan fasilitas untuk makan dan berkegiatan bersama penduduk setempat. Dengan kata lain wisatawan hanya singgah dan tidak tinggal bersama penduduk dan biasanya di lakukan dalam satu hari saja.
3. Interaksi tidak langsung: dalam interaksi ini masyarakat desa hanya mendapatkan manfaat tanpa interaksi langsung dengan wisatawan. Kegiatan yang dilakukan seperti penulisan buku tentang desa yang berkembang, kehidupan desa, arsitektur tradisional, dan lain sebagainya.

2.17.2 Pendekatan Fisik Pengembangan Desa

Solusi umum dalam pengembangan sebuah desa melalui sektor pariwisata adalah dengan menggunakan standar khusus dalam mengontrol dan menerapkan aktivitas konservasi. Pada pendekatan fisik terdapat beberapa tindakan yang merupakan implementasi dari pendekatan fisik, yaitu:

1. Mengonservasi sejumlah rumah yang memiliki nilai budaya dan arsitektur yang tinggi dan dijadikan museum untuk mempertahankan ciri khas dari desa tersebut.
2. Mengonservasi keseluruhan desa seperti halnya menyediakan lahan baru untuk menampung perkembangan penduduk desa tersebut dan juga untuk mengembangkan area wisata dengan fasilitas wisata.
3. Mengembangkan akomodasi di dalam wilayah desa yang dioperasikan oleh penduduk desa tersebut sebagai industri skala kecil.

Berdasarkan 3 tindakan tersebut, maka prinsip-prinsip dasar dari pengembangan fisik desa wisata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan fasilitas wisata dan pelayanan di dalam atau yang dekat dengan desa.
2. Fasilitas dan pelayanan wisata di desa dilakukan oleh penduduk desa atau adanya kerjasama dengan pihak luar.
3. Pengembangan desa wisata didasarkan pada budaya tradisional yang ada pada masyarakat atau desa tersebut atau sifat atraksi wisata yang lekat dengan alam.

2.18 Tipologi Desa Wisata

Berdasarkan pola, proses dan pengelolaannya desa atau kampung wisata, Hadiwijoyo menyatakan terdapat 2 bentuk tipologi, yaitu:

1. Tipe terstruktur
 - Lahan terbatas yang dilengkapi infrastruktur yang spesifik pada kawasan atau desa wisata tersebut.
 - Lokasi terpisah dari masyarakat setempat, yang memungkinkan dampak negatif yang timbul dapat terkontrol.
 - Lahan tidak terlalu luas dan masih dalam tingkat perencanaan yang integratif dan terkoordinir.
2. Tipe terbuka

Pada tipe ini terdapat karakter yang tumbuh dan menyatu dengan struktur kehidupan, baik ruang maupun pola masyarakat setempat. Pendapatan dari wisatawan jika menggunakan tipe ini dapat langsung di nikmati oleh penduduk

lokal, akan tetapi dampak negatifnya cepat menjalar menjadi satu dalam penduduk lokal, sehingga sulit dikendalikan.

2.19 Dampak Pengembangan Desa Wisata Terhadap Peningkatan Sosial

Ekonomi

Dampak pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal dapat dikategorikan menjadi delapan kelompok besar (Cohen, 1984), yaitu:

1. Dampak terhadap penerimaan devisa
2. Dampak terhadap pendapatan masyarakat
3. Dampak terhadap kesempatan kerja
4. Dampak terhadap harga-harga
5. Dampak terhadap distribusi manfaat/keuntungan
6. Dampak terhadap kepemilikan dan kontrol
7. Dampak terhadap pembangunan pada umumnya
8. Dampak terhadap pendapatan pemerintah.

2.20 Dampak Sosial

Dampak sosial merupakan pengaruh sosial yang terjadi setelah adanya suatu program dan merupakan perubahan yang terjadi pada manusia, misalnya hubungan atau interaksi antar individu. Dampak sosial menurut Ilmiyah,dkk (2014), merupakan suatu akibat yang terjadi didalam masyarakat karena adanya suatu perubahan yang terjadi di dalam masyarakat dan perubahan yang terjadi bersifat sosial, seperti pendidikan dan kesehatan masyarakat. Kegiatan sosial juga tidak terlepas dari interaksi sosial, karena merupakan syarat utama terjadinya aktivitas sosial (Soekanto, 1987). Adapun indikatornya adalah :

1. Pendidikan

Tidak dapat dihindari bahwa salah satu fungsi dari pendidikan adalah menyiapkan seseorang sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar ini berupa bentuk sikap, pengetahuan dan keterampilan kerja. Ini menjadi misi penting dari pendidikan karena bekerja menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia.

2. Interaksi Sosial

Proses interaksi sosial menurut Blumer (1969), adalah saat manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang dimiliki yang berasal dari interaksi antara seseorang dengan sesamanya.

2.21 Dampak Ekonomi

Istilah ekonomi diartikan sebagai cara manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang berkaitan dengan pendapatan, biaya dan kepemilikan modal (Soekartawi, 1996). Pekerjaan yang dimiliki mempengaruhi jumlah pendapatan yang didapat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998), pekerjaan sama artinya dengan mata pencaharian. Dimana mata pencaharian atau pekerjaan ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang pada setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas yang dilakukan dalam pekerjaan ini sendiri, yaitu yang bernilai ekonomi dan dapat memperoleh penghasilan tetap demi mempertahankan kelangsungan hidup. Pekerjaan dapat berupa buruh, karyawan, bertani, nelayan maupun membuka usaha. Dari hasil melakukan pekerjaan ini nantinya akan didapatkan penghasilan yang juga merupakan pendapatan.